

“Kalau rumah adalah tempat paling aman, kenapa justru di sana yang lemah paling sering terluka?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Siapa yang Menjaga Ruang Privat?"

Pekan ini linimasa dipenuhi kabar yang sulit dicerna: seorang perempuan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual di sebuah kawasan Jakarta, seorang remaja putri di sebuah kabupaten di Jawa Timur diduga dijadikan korban oleh banyak pelaku, seorang mahasiswa di sebuah universitas di Sumatera diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah korban. Pola yang muncul mengganggu justru karena satu kesamaan:

kejahatan terjadi di ruang yang secara sosial dianggap aman — rumah, kampung, kampus, tempat singgah. Ruang privat, yang selama ini dibayangkan sebagai benteng, ternyata bisa menjadi titik paling rapuh. Pertanyaannya bukan sekadar "mengapa ada pelaku jahat," tetapi "mengapa struktur perlindungan gagal justru di lingkaran terdekat?"

Lensa pertama, dari kriminologi. Kekerasan di ruang privat sulit terdeteksi karena tertutup oleh norma "urusan keluarga bukan urusan orang." Implikasinya, semakin privat sebuah ruang, semakin lemah pengawasan sosialnya. Tetapi celah lensa ini: bila solusinya membuka semua ruang privat pada pengawasan, kita mengorbankan hak atas privasi yang juga penting bagi martabat manusia. Pertanyaan yang muncul: di mana garis antara pengawasan yang melindungi dan intrusi yang menindas?

Lensa kedua, dari sosiologi relasi kuasa. Kekerasan pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas hampir selalu mencerminkan ketimpangan kuasa — pihak kuat mengeksploitasi pihak yang tidak punya suara. Implikasinya, perlindungan sejati menuntut pemberdayaan yang lemah, bukan sekadar penghukuman pelaku. Celah lensa ini: fokus pada relasi kuasa kadang mereduksi manusia menjadi kategori "kuat" dan "lemah" yang statis, mengabaikan bahwa peran itu bisa berlapis dan berubah. Lalu, bagaimana memberdayakan tanpa memenjarakan orang dalam label korban?

Lensa ketiga, dari teologi Islam. Konsep *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* — menjaga jiwa dan keturunan — menempatkan perlindungan yang lemah bukan sebagai kebaikan opsional, melainkan *fardh kifayah*, kewajiban kolektif yang menjadi dosa bersama bila diabaikan. Sabda Nabi tentang umat yang tidak bisa suci selama hak si lemah tidak ditegakkan dari si kuat menegaskan bahwa kesalehan komunal diukur dari perlakuan terhadap yang paling tak berdaya. Celah lensa ini bukan pada

prinsipnya, melainkan pada penerapannya: prinsip yang mulia sering berhenti sebagai khotbah tanpa mekanisme konkret. Bagaimana mengubah *fardh kifayah* dari slogan menjadi sistem?

Lensa keempat, dari psikologi perkembangan. Anak dan korban yang tidak berani bicara sering karena lingkungannya menghukum keterbukaan — dibentak, dituduh berbohong, atau dipermalukan. Implikasinya, keamanan sejati dibangun dari relasi yang membuat korban berani bersuara. Celah lensa ini: menempatkan seluruh beban pada "keberanian bicara" bisa menyalahkan korban yang diam, padahal diam sering kali adalah mekanisme bertahan hidup. Maka pertanyaannya: bagaimana membangun sistem yang tidak menunggu korban berani, tetapi aktif menjangkau?

Apa yang bisa dilakukan mahasiswa hari ini, tanpa menunggu perubahan besar? Di kos dan kontrakan, sepakati aturan tak tertulis: tidak membiarkan teman perempuan pulang sendirian larut malam, dan saling mengecek kabar. Di kampus, kenali kanal pelaporan kekerasan seksual yang resmi, dan sebarkan informasinya agar korban tahu ke mana harus mengadu. Di organisasi, dorong adanya kode etik yang jelas soal relasi kuasa antara senior dan junior. Di lingkaran pertemanan, latih diri menjadi pendengar yang tidak menghakimi ketika seseorang bercerita soal luka — sikap sekecil ini bisa menjadi satu-satunya pintu keluar bagi korban. Dan di ruang digital, tahan diri dari menyebar identitas korban atas nama "viralkan," karena viralitas sering melukai korban dua kali.

Yang penting bukan menemukan satu jawaban final atas mengapa ruang privat gagal menjaga. Yang lebih jujur adalah menyadari bahwa setiap lensa — kriminologi, kuasa, teologi, psikologi — menerangi satu sisi sambil menyisakan bayangan di sisi lain. Mungkin perlindungan sejati bukan produk satu disiplin, melainkan pertemuan mereka: sistem

yang mengawasi tanpa menindas, memberdayakan tanpa melabeli,
berprinsip sekaligus bermekanisme, dan menjangkau tanpa menunggu.

| Pertanyaan

Q · 01

Bukannya ini masalah sistem hukum yang lemah, bukan urusan mahasiswa atau agama?

A

Sebagian benar — penegakan hukum memang krusial dan tidak tergantikan. Tapi hukum bekerja setelah kejahatan terjadi, sementara pencegahan hidup di ruang sosial sehari-hari: siapa yang berani menegur, siapa yang mau mendengar korban, siapa yang tidak menormalkan pelecehan sebagai "candaan." Sistem dan kultur bukan pilihan biner; keduanya saling menopang.

Q · 02

Kenapa harus bawa-bawa agama? Perlindungan anak itu nilai universal, tidak perlu label religius.

A

Betul, perlindungan yang lemah adalah nilai universal, dan itu justru menguatkan, bukan melemahkan. Menyebut *fardh kifayah* di sini bukan untuk mengklaim monopoli moral, melainkan menunjukkan bahwa bagi komunitas Muslim, ini bukan sekadar imbauan sosial melainkan kewajiban yang berkonsekuensi. Bagi yang tak seagama, argumen universalnya tetap utuh berdiri sendiri.

Q · 03

Bukankah menyuruh korban "berani bicara" itu menyalahkan korban yang diam?

A

Kritik ini tepat dan penting. Diam sering adalah strategi bertahan hidup, bukan kelemahan. Karena itu artikel ini justru menekankan sistem yang menjangkau aktif, bukan menunggu keberanian. Beban tidak boleh ditumpuk pada korban; tugas komunitas adalah menciptakan lingkungan yang cukup aman sehingga bicara tidak lagi terasa berbahaya.

Q · 04

Kalau pelakunya orang dekat atau dihormati, bukankah membongkarnya justru memecah komunitas?

A

Ketakutan "memecah komunitas" itulah yang sering menjadi tameng pelaku. Komunitas yang sehat tidak diukur dari ketiadaan konflik, melainkan dari keberpihakannya pada yang terluca. Menutupi demi harmoni semu justru mengkhianati fungsi komunitas sebagai pelindung. Keadilan bagi korban adalah bentuk tertinggi dari menjaga keutuhan.

Saya sendiri tidak taat beragama — apa argumen ini masih relevan buat saya?

A

Sangat relevan, karena inti argumennya tidak bergantung pada ketaatan ritual. Perlindungan terhadap yang lemah, kepekaan mendengar, dan penolakan terhadap penyalahgunaan kuasa adalah komitmen etis yang bisa dipegang siapa pun. Referensi teologis di sini berfungsi sebagai satu lensa di antara lensa lain, bukan syarat masuk untuk peduli.